



Desa Taat Pajak, APBD Sehat Indonesia Sejahtera

*Pj Ismail Buka Forum Sosialisasi
Perpajakan APBdes 2024*

Pj Bupati Mempawah, Ismail membuka Forum Sosialisasi Perpajakan APBDES 2024 Kabupaten Mempawah yang diselenggarakan di Mempawah Convention Center(MCC), Rabu (23/10).



SOSIALISASI PERPAJAKAN - Pj Bupati Mempawah, Ismail membuka Forum Sosialisasi Perpajakan APBDES 2024 Kabupaten Mempawah yang diselenggarakan di Mempawah Convention Center(MCC), Rabu (23/10).

Kegiatan tersebut diselenggarakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya dengan tema Desa Taat Pajak, APBD Sehat Indonesia Sejahtera.

Ada tiga desa dengan ketaatan pajak TW 3 di antaranya Desa Sengkubang, Desa Mendalok dan Desa Bukit Batu.

Pj Bupati Mempawah, Ismail menyampaikan kegiatan ini sangat penting dan strategis untuk kepentingan bersama dalam tata kelola keuangan desa khusus kepatuhan pembayaran pajak, karena untuk daerah sendiri.

“Kita (Mempawah) terdapat 60 desa den-

gan anggaran sebesar Rp 59.953.199.000 Dana Desa. Itu belum termasuk anggaran desa yang merupakan sumber dana desa yang harus dituangkan dalam APB-Des,” katanya.

Ismail mengatakan bahwa salah satu kewajiban pemerintah desa di dalam tahapan pelaksanaan belanja desa yaitu melakukan pemotongan pajak terhadap belanja yang dilakukan dan menyertakan pajak tepat waktu, karena dengan memahami aturan terkait perpajakan maka pemerintah desa dapat menerapkan pemotongan pajak sesuai dengan jenis belanja yang dilakukan.

“Pemerintah desa perlu mengetahui item belanja yang dikenakan pajak dan item belanja yang bebas pajak agar pemerintah desa tidak salah dalam memotong pajak sesuai dengan jenis belanja yang dilakukan,” ujarnya.

Ismail juga mengungkapkan dengan pelaksanaan transaksi belanja desa yang sudah menggunakan cash management system dapat mempermudah pemerintah desa dalam penyetoran pajak tepat waktu.

“Karena pemerintah desa yang salah dalam memotong pajak dan terlambat dalam pembayaran pajak bisa berpotensi menjadi temuan di kemudian hari,”

tegasnya.

Ismail juga mengatakan kegiatan ini juga dapat menjadi edukasi dan pengawasan kewajiban perpajakan instansi pemerintah desa serta sebagai ajang apresiasi terhadap desa yang berkontribusi terbaik dalam persentase pembayaran pajak dari pagu desa serta menjadi sarana bersinergi seluruh pihak dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan desa.

Kepala KPP Pratama Kubu Raya Suyono menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan rutin setiap tahun dengan tujuan ingin bersinergi dan mengawasi dan asisten mengenai kewa-

jiban potong dan pemungutan atas belanja dana desa yang dilakukan.

“Jadi, APBDes yang diterima berasal dari pajak,” paparnya.

Suyono juga meminta bantuan dari seluruh perangkat desa agar kewajiban yang telah dipungut untuk dapat disetor, bahwa rasio pajak yang dibayar dari APBDes masih sangat kecil baru sebesar 1,58 persen dari pagu anggaran dana desa, dimana naik pada 3,11 persen seperti tahun 2023 lalu.

“Silakan konsultasi kepada para petugas yang tersedia untuk dapat bersama meningkatkan pajak,” ujarnya. **(ben)**